

**Dokumentasi Wawancara dengan Bapak Drs. Rahmat Sutomo
selaku Kepala Seksi Verifikasi dan Distribusi
Kartu Pegawai Elektronik (KPE)
Badan Kepegawaian Negara--Republik Indonesia
(Fokus pada Implementor--Badan Kepegawaian Negara)**



**Pada Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia
(Kamis, 8 Mei 2014)**





HASIL WAWANCARA

JUDUL : EVALUASI KEBIJAKAN
PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG
DALAM IMPLEMENTASI KARTU PEGAWAI
ELEKTRONIK (KPE)

Fokus pada Implementor (BKN)

1. Apakah yang menjadi tujuan di berlakukannya Kartu Pegawai Elektronik bagi Pegawai Negeri Sipil?

Jawab : Iya tentu saja, Kartu Pegawai Elektronik adalah Kartu Identitas Pegawai Negeri Sipil dan keluarganya yang memuat data secara elektronik. Tujuan utamanya berfungsi Multiguna untuk pelayanan dibidang kepegawaian dan pengendalian data kepegawaian.

2. Apakah Implementor telah melaksanakan prosedur administratif sesuai dengan ketentuan?

Jawab : Iya tentu saja, segala peraturan atau prosedur administratif sudah kami laksanakan.

3. Kendala apa saja yang dihadapi dalam implementasi KPE?

Jawab : Pada dasarnya, tidak ada kendala yang berarti yang BKN hadapi dalam implementasi KPE, setelah diluncurkan pada tahun 2008 melalui peraturan Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2008, BKN selanjutnya mendelegasikan implementasi KPE keseluruh Indonesia melalui Badan Kepegawaian Daerah baik itu provinsi, kabupaten ataupun kota sebagai

leading sector KPE dengan mendatangi MoU, kalau kendala mungkin ada pada daerah masing - masing.

4. Sebelum diimplementasikannya Kartu Pegawai Elektronik (KPE), sudah berapa kali proses sosialisasi yang dilakukan?

Jawab : Iya, yang kami lakukan adalah menghubungi BKD daerah terkait agar segera melakukan sosialisasi, BKN hanya bersifat berkoordinasi dengan BKD yang ada di provinsi, kabupaten dan kota yang ada diseluruh Indonesia.

5. Bagaimana Peranan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dalam proses implementasi Kartu Pegawai Elektronik (KPE) di pemerintah kota Bandar Lampung ?

Jawab : Ya, BKN berkoordinasi dengan daerah untuk melakukan proses implementasi dengan cara mengadakan jadwal pengambilan data PNS, dalam hal ini Foto PNS dan sidik jari PNS sebagai bahan untuk pembuatan KPE PNS.

6. Apakah Proses pengarahan yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN), membantu Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam menyelesaikan kendala- kendala yang dihadapi dilapangan ?

Jawab : Ya tentu saja.

7. Bisa anda ceritakan bagaimana proses terjadinya kerjasama yang dilakukan pemerintah kota Bandar Lampung dengan pihak Ke-tiga ?

Jawab : Ya, sepengetahuan saya untuk Kota Bandar Lampung memang belum memfungsikan layanan KPE, misalnya saja Layanan Gaji atau perbankan dan kesehatan. Sudah beberapa kali BKD Kota Bandar Lampung berkoordinasi tentang ini, tetapi memang kewenangan BKN hanya sebatas itu, tidak ada ketentuan yang bisa memaksa semua layanan KPE untuk diterapkan. Semua tergantung dari kebijakan pimpinan (Walikota).

8. Kendala – Kendala apa saja yang dihadapi dalam menjalin kerjasama dengan pihak ke-tiga ?

Jawab : Ya seperti yang sudah dijelaskan tadi, jika memang kebijakan dari pimpinan (Walikota) ingin menerapkan KPE hanya sebagai Kartu Identitas Pegawai Negeri Sipil, BKN tidak bias berbuat banyak, hanya sebatas menyarankan untuk memanfaatkan layanan perbankan untuk meningkatkan layanan di bidang kepegawaian.

9. Sudah berapa kali dilakukan distribusi KPE yang sudah jadi dari BKN ?

Jawab : Untuk Kota Bandar Lampung, berdasarkan data yang kami punya sudah 3 kali dengan jumlah KPE 9.361 Kartu.

10. Apakah fungsi Kartu Pegawai Elektronik telah sesuai dengan peruntukannya?

Jawab : Iya tentu saja, beberapa daerah sudah melaksanakannya sebut saja DKI Jakarta.

11. Apakah sudah tercapai tujuan yang ingin di capai?

Jawab : Iya sudah,walau belum seluruhnya dan hanya di sebagian daerah.

Fokus pada Sumber Daya (Fasilitas, Informasi, dan Komunikasi)

1. Apakah sumberdaya yang ada sudah mendukung kebijakan tersebut?

Jawab : Iya sudah.

2. Bagaimana Kesiapan/kemampuan Sumber Daya Manusia (PNS) dalam proses Implementasi Kartu Pegawai Elektronik (KPE)?

Jawab : Dalam konteks Kota Bandar Lampung tentu saja kami pandang mampu mengimplementasikan KPE. BKN dalam proses implementasi KPE menunjuk pihak ke-3 sebagai rekanan dalam melakukan perekaman data PNS seluruh Indonesia.

3. Bagaimana proses Alokasi Sumber Dana dalam Implementasi Kartu Pegawai Elektronik (KPE) di Badan Kepegawaian Negara ?

Jawab : Iya tentu saja, semenjak tahun 2008, Badan Kepegawaian Negara sudah meralokasikan dana dalam APBN untuk pembiayaan implementasi KPE di seluruh Indonesia.

4. Apakah pelaksana, dalam hal ini Badan Kepegawaian Negara sudah melakukan sosialisasi tentang Kartu Pegawai Elektronik (KPE) kepada PNS?

Jawab : Iya tentu saja melalui Badan Kepegawaian Daerah yang ada di provinsi, kabupaten ataupun kota yang tersebar di seluruh Indonesia.

5. Bagaimana cara implementor dalam melaksanakan sosialisasi KPE kepada PNS?

Jawab : Melalui internet, bisa dilihat di web sites BKN.

6. Hambatan dan kendala Teknis apa saja yang anda hadapi dalam proses Implementasi Kartu Pegawai Elektronik (KPE)?

Jawab : Selama ini terkendala anggaran, sehingga penerapan KPE se-Indonesia dilaksanakan secara bertahap.

7. Bagaimana Kesiapan Teknis (Teknologi) dalam proses Implementasi Kartu Pegawai Elektronik (KPE)?

Jawab : Iya, teknologi sudah sesuai spesifikasi yang kami harapkan dan pihak rekanan yaitu PT. Sucofindo sudah memenuhi itu.

8. Apakah PNS dapat dengan mudah mengakses informasi tentang KPE?

Jawab : Iya tentu saja.

9. Apakah ada pelayanan informasi di BKD tentang KPE?

Jawab : Iya, melalui Loker Pelayanan Informasi Kepegawaian.